



LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN 2024

**Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini merupakan laporan yang menyajikan pengukuran Realisasi Kegiatan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan serta yang menjadu kendala yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Pengukuran tersebut merupakan tolak ukur penilaian pencapaian kinerja Dinas di tahun anggaran 2024.

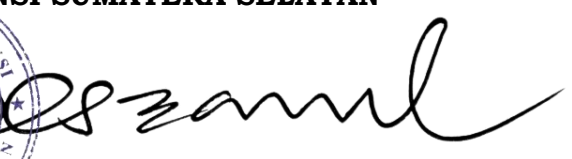
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan bahan evaluasi pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan pada tahun tersebut, sehingga dokumen ini merupakan salah satu dasar perencanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di masa-masa mendatang, sehingga program dan kegiatan akan mencapai hasil yang lebih baik.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2024 ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar LKPJ ini bisa bermanfaat dan berguna sebagai bahan penyusunan program dan rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Selatan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**




ARIES IRWAN WAHYU, S.STPi., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 196811201989031006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fokus pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan, sehingga mempunyai manfaat untuk program dan kegiatan yang mengacu pada segi efektivitas dan efisiensi yang pada akhirnya menghasilkan nilai manfaat yang baik bagi masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis untuk menjadi tumpuan dalam mewujudkan tiga pilar pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi andalan untuk peningkatan produksi perikanan dalam rangka penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

1.2 Visi dan Misi

VISI SUMSEL 2025-2029

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

- Sumsel sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil
- Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi

seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik

MISI

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan rumah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi

1.3.2 Fungsi

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil serta Ruang Laut dan Ruang Perairan Umum Daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan Masyarakat Pesisir, PUD dan Pulau Pulau Kecil, pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD

- b. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil serta Ruang Laut dan Ruang Perairan Umum Daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan Masyarakat Pesisir, PUD dan Pulau Pulau Kecil, pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, Pengelolaan UPTD;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil serta Ruang Laut dan Ruang Perairan Umum Daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan Masyarakat Pesisir, PUD dan Pulau Pulau Kecil, pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD.

- d. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- e. Pembinaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.4. Data Umum

1.4.1 Jumlah PNS dan Non PNS

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	24	22,02
2	S1	58	53,21

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	60	55,05
2	Perempuan	48	44,04
		108	

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	I/d	1	0,92
2	I/c	-	-
3	I/b	-	-
4	I/a	-	-
5	II/d	2	1,83
6	II/c	2	1,83
7	II/b	-	-
8	II/a	-	-
9	III/a	3	2,75
10	III/b	19	17,43
11	III/c	20	18,35
12	III/d	24	22,02
13	IV/a	12	11,01
14	IV/b	5	4,59
15	IV/c	2	1,83
16	IV/d	-	-
17	Golongan IX	13	11,93
18	Golongan VII	5	4,59
		108	

1.4.2 SARANA DAN PRASARANA

No	sarana dan prasarana	gedung/ruang		Keterangan
		Jumlah	Fasilitas	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Kepala Dinas	Pembelian 2024
2	Kursi Rapat Pejabat lainnya	1	Kepala Dinas	Pembelian 2024
1	Lap Top LENOVO / IdeaPad Duet 5i	2	Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Pembelian 2024
2	Lap Top HP / Pavilion Aero 13-be2002	1	Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Pembelian 2024
3	Printer EPSON / L5290	2	Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Pembelian 2024
4	Printer EPSON / L3250	1	Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Pembelian 2024

No	sarana dan prasarana	gedung/ruang		Keterangan
		Jumlah	Fasilitas	
1	Unit Power Supply	1	UPTD LPPMHP	Pembelian 2024
2	Bacterial Colony Counter	1	UPTD LPPMHP	Pembelian 2024
3	Microscope	1	UPTD LPPMHP	Pembelian 2024
4	unit alat laboratorium lainnya lainnya	1	UPTD LPPMHP	Pembelian 2024
5	unit alat laboratorium lainnya lainnya	1	UPTD LPPMHP	Pembelian 2024
6	P.C Unit	1	UPTD LPPMHP	Pembelian 2024

No	sarana dan prasarana	gedung/ruang		Keterangan
		Jumlah	Fasilitas	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Keba	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
2	Filing Cabinet Besi	10	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
3	CCTV - Camera Control Television Syst	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
4	Meja Rapat	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
5	Kursi Tamu	5	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
6	A.C. Split	5	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
7	A.C. Split	5	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
8	Televisi	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
9	Televisi	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
10	Televisi	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
11	Loudspeaker	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
12	Bracket Standing Peralatan	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
13	Bracket Standing Peralatan	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
15	Kursi Kerja Pejabat lainnya	10	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
16	Lensa Kamera	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
17	Camera Digital	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
18	Camera Conference	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
19	P.C Unit	6	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
20	Lap Top	8	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
21	Lap Top	3	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
22	Tablet PC	2	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
23	Tablet PC	2	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
24	Tablet PC	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
27	External/ Portable Hardisk	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024
28	Router	1	Tanpa Ruangan	Pembelian 2024

**BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)**

2.1 Pengelolaan Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024
1	2	3
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	40.000.000,00

2.2 Pengelolaan Belanja

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	40.339.887.980,00
5.1	BELANJA OPERASI	34.835.619.980,00
5.1.01	Belanja Pegawai	15.546.285.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.289.334.980,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	34.835.619.980,00
5.2	BELANJA MODAL	5.504.268.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.739.900.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.564.368.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.504.268.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
1	2		3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp 25.258.452.600,00
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 968.200.000,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	751.200.000,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000,00
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	200.000.000,00
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 18.237.110.000,00
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.324.655.000,00
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.895.455.000,00
	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	17.000.000,00
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 100.000.000,00
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 100.000.000,00
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 530.500.000,00
	8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 292.500.000,00
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	238.000.000,00
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.461.532.980,00
	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	620.000.000,00
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	291.532.980,00
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00
	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000,00
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	415.400.000,00
	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.400.000,00
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.309.620,00
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	827.309.620,00
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.000.000,00
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.440.400.000,00
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	590.400.000,00
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00
	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000,00

II	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL		Rp	850.000.000,00
	i	Kegiatan Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp	750.000.000,00
	23	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		400.000.000,00
	24	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		350.000.000,00
	ii	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	100.000.000,00
	25	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp	100.000.000,00

III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Rp	5.073.120.000,00
	i	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Rp	650.000.000,00
	26	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		550.000.000,00
	27	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		100.000.000,00
	ii	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1.350.000.000,00
	28	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		1.350.000.000,00
	iii	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Rp	150.000.000,00
	29	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Rp	150.000.000,00
	iv	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp	2.923.120.000,00
	30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		2.400.768.000,00
	31	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		522.352.000,00

IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Rp	5.628.005.380,00
	i	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp	100.000.000,00
	32	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		100.000.000,00
	ii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp	300.000.000,00
	33	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp	300.000.000,00
	iii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Rp	5.228.005.380,00
	34	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.813.600.000,00
	35	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3.414.405.380,00

V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Rp	900.000.000,00
	i	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Rp	900.000.000,00
	36	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Rp	410.000.000,00
	37	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		490.000.000,00

VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		2.630.310.000,00
	i	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.549.100.000,00
	38	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	857.300.000,00
	39	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	691.800.000,00
	ii	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.081.210.000,00
	40	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	533.710.000,00
	41	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	547.500.000,00
Jumlah : 41 kegiatan			Rp 40.339.887.980,00

BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		Rp 40.339.887.980	Rp 38.313.085.791	94,98	100,00			
				I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Perkantoran yang terlayani	Rp 25.258.452.600	Rp 23.582.842.730	93,37	100,00			
				A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 968.200.000	Rp 939.613.685	97,05	100,00			
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 751.200.000	Rp 724.526.814	96,45	100,00			
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 17.000.000	Rp 16.857.500	99,16	100,00			
				3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 200.000.000	Rp 198.229.371	99,11	100,00			
				B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 18.237.110.000	Rp 16.945.097.955	92,92	100,00			
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang telah dibayar gaji dan tunjangan ASN	Rp 15.324.655.000	Rp 14.318.646.455	93,44	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga Administrasi keuangan serta data dan	Rp 2.895.455.000	Rp 2.609.624.000	90,13	100,00			
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Dokumen Laporan Tahunan	Rp 17.000.000	Rp 16.827.500	98,99	100,00			
				C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	Rp 100.000.000	Rp 99.830.400	99,83	100,00			
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jaminan barang milik daerah	Rp 100.000.000	Rp 99.830.400	99,83	100,00			
				D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp 530.500.000	Rp 366.721.472	69,13	100,00			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 292.500.000	Rp 287.950.000	98,44	100,00			
				2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah SDM yang terlatih dalam hal pendidikan dan kursus	Rp 238.000.000	Rp 78.771.472	33,10	100,00			
				E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Rp 2.461.532.980	Rp 2.421.800.871	98,39	100,00			
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan	Rp 100.000.000	Rp 99.773.000	99,77	100,00			
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 620.000.000	Rp 615.959.495	99,35	100,00			
				3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Rp 291.532.980	Rp 284.185.500	97,48	100,00			
				4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Rp 250.000.000	Rp 248.133.000	99,25	100,00			
				5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Rp 200.000.000	Rp 199.156.000	99,58	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar	Rp 1.000.000.000	Rp 974.593.876	97,46	100,00			
				F. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Rp 415.400.000	Rp 415.400.000	100,00	100,00			
				1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Rp 415.400.000	Rp 415.400.000	100,00	100,00			
				G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Rp 1.105.309.620	Rp 979.120.010	88,58	100,00			
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air listrik	Rp 827.309.620	Rp 711.280.010	85,98	100,00			
				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Rp 278.000.000	Rp 267.840.000	96,35	100,00			
				H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Rp 1.440.400.000	Rp 1.415.258.337	98,25	100,00			
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 350.000.000	Rp 347.091.263	99,17	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	Rp 590.400.000	Rp 573.472.250	97,13	100,00			
				3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Rp 100.000.000	Rp 98.000.000	98,00	100,00			
				4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	Rp 400.000.000	Rp 396.694.824	99,17	100,00			
				II. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi	Rp 850.000.000	Rp 770.478.374	90,64	100,00			
				A. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kegiatan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Rp 750.000.000	Rp 671.960.674	89,59	100,00			
				1. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat	Luas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang dikelola	Rp 400.000.000	Rp 341.624.074	85,41	100,00			
				2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Rp 350.000.000	Rp 330.336.600	94,38	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya	Rp 100.000.000	Rp 98.517.700	98,52	100,00			
				1. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya	Rp 100.000.000	Rp 98.517.700	98,52	100,00			
				III PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton), Nilai Tukar Nelayan/NTN	Rp 5.073.120.000	Rp 4.978.824.907	98,14	100,00			
				A. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Rp 650.000.000	Rp 647.515.698	99,62	100,00			
				1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Rp 550.000.000	Rp 547.641.199	99,57	100,00			
				2. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Rp 100.000.000	Rp 99.874.499	99,87	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				B. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 1.350.000.000	Rp 1.288.165.715	95,42	100,00			
				1 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan	Rp 1.350.000.000	Rp 1.288.165.715	95,42	100,00			
				C. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Rp 150.000.000	Rp 141.375.999	94,25	100,00			
				1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rp 150.000.000	Rp 141.375.999	94,25	100,00			
				D. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kegiatan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp 2.923.120.000	Rp 2.901.767.495	99,27	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang	Rp 2.400.768.000	Rp 2.391.200.000	99,60	100,00			
				2. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan pengusaha Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Rp 522.352.000	Rp 510.567.495	97,74	100,00			
				I PROGRAM PENGELOLAAN V PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya, Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTP)	Rp 5.628.005.380	Rp 5.579.797.197	99,14	100,00			
				A. Penerbitan Izin usaha Perikanan di Bidang		Rp 100.000.000	Rp 99.590.000	99,59	100,00			
				1. Penyediaan Data dan Informasi usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di laut berdasarkan skala usaha dan tingkat Risiko	Rp 100.000.000	Rp 99.590.000	99,59	100,00			
				B. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di laut	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Rp 300.000.000	Rp 298.970.000	99,66	100,00			
				1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp 300.000.000	Rp 298.970.000	99,66	100,00			
				C. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan di Perairan Darat	Rp 5.228.005.380	Rp 5.181.237.197	99,11	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				1 Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	Rp 1.813.600.000	Rp 1.796.628.750	99,06	100,00			
				2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.414.405.380	Rp 3.384.608.447	99,13	100,00			
				V PROGRAM PENGAWASAN . SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi	Rp 900.000.000	Rp 893.905.420	99,32	100,00			
				A. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Rp 900.000.000	Rp 893.905.420	99,32	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				1. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	Jumlah Sarana perlengkapan POKMASWAS sumberdaya Kelautan dan perikanan (DAK)	Rp 410.000.000	Rp 410.000.000	100,00	100,00			
				2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Rp 490.000.000	Rp 483.905.420	98,76	100,00			
				V PROGRAM PENGOLAHAN DAN I. PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Sampel yang Teruji (sampel), Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan	Rp 2.630.310.000	Rp 2.507.237.163	95,32	100,00			
				A. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah	Rp 1.549.100.000	Rp 1.464.373.300	94,53	100,00			
				1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Rp 857.300.000	Rp 831.624.293	97,01	100,00			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							(Rp)	(%)	Fisik			
				2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	jumlah unit usaha yang diberikan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Rp 691.800.000	Rp 632.749.007	91,46	100,00			
				B. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah 'Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp 1.081.210.000	Rp 1.042.863.863	96,45	100,00			
				1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 533.710.000	Rp 501.478.920	93,96	100,00			
				2 Penyediaan data dan Informasi Usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi yang diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen logistik ikan dan terkoneksi dari hulu sampai hilir perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	Rp 547.500.000	Rp 541.384.943	98,88	100,00			
						Rp 40.339.887.980	Rp 38.313.085.791	94,98	100,00			

3.2 Kebijakan Strategis yang di tetapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	Tujuan/ Masalah Yang Di Selesaikan
1	Pemanfaatan potensi perairan umum dan laut secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi perikanan;	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Pasal 4 Ayat (1): "Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan." • Pasal 6 Ayat (1): "Pengelolaan sumber daya ikan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, optimalisasi manfaat, dan tanggung jawab terhadap lingkungan." Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, termasuk perairan umum dan laut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan • Mengatur perizinan, pemanfaatan, serta pengelolaan sumber daya perairan laut dan perairan umum secara optimal dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Menetapkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang lestari, bertanggung jawab, serta berbasis kuota dan zonasi.	Tujuan Utama: • Menjamin pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat perikanan. • Meningkatkan produktivitas sektor perikanan tanpa merusak ekosistem laut dan perairan umum. Permasalahan yang Diselesaikan: • Eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan (<i>overfishing</i>). • Ketidakseimbangan antara peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan. • Minimnya regulasi yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab ekologi dalam pengelolaan perikanan.
2	Pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pemberian pelatihan, percontohan dan bantuan;	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (<i>sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009</i>) • Pasal 7 ayat (2): Pemerintah berkewajiban meningkatkan kemampuan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pelaku usaha lainnya dalam bidang perikanan. • Pasal 9 ayat (1): Pemerintah dapat memberikan bantuan sarana dan	Tujuan: • Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha perikanan, terutama nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. • Mendorong peningkatan produksi dan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	Tujuan/ Masalah Yang Di Selesaikan
		prasarana serta pelatihan untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Mengatur pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam bidang kelautan dan perikanan. - Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil - Mengatur secara khusus mengenai program pemberdayaan melalui pelatihan, penyuluhan, bantuan sarana, teknologi tepat guna, dan percontohan usaha. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 47/PERMEN-KP/2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Menegaskan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan penyediaan bantuan sarana-prasarana. Permen KP Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan - Menjadi dasar operasional pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui penyuluhan yang terstruktur dan berkelanjutan.	kesejahteraan masyarakat perikanan melalui bantuan, pelatihan, dan penyediaan sarana-prasarana. Permasalahan yang diselesaikan: - Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan teknologi. - Rendahnya produktivitas dan keterampilan pelaku usaha perikanan kecil. - Minimnya dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat perikanan.
3	Peningkatan kualitas lingkungan perairan dengan merehabilitasi dan menjaga lingkungan perairan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Pasal 60: Pemulihan wilayah pesisir dan perairan dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem dan pengendalian pencemaran. - Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum diakomodasi dalam pengawasan dan perlindungan kawasan pesisir. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tujuan dan Permasalahan yang Diselesaikan: - Mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. - Menanggulangi praktek perikanan ilegal, merusak, dan tidak ramah lingkungan. - Memperkuat

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	Tujuan/ Masalah Yang Di Selesaikan
		- Pasal 3: Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk menjaga fungsi lingkungan hidup. - Pasal 63 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian, pemantauan, dan rehabilitasi lingkungan hidup. - Pasal 70: Masyarakat berhak dan berkewajiban berperan aktif dalam perlindungan lingkungan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004) - Mengatur pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan - Pasal 69 – mengatur ketentuan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan - Pasal 73 – tentang kewenangan penyidik perikanan - Sanksi pidana terhadap perusakan sumber daya ikan dan lingkungan perairan	mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan. Menyediakan dasar hukum bagi penyidikan, pengawasan, dan pemberian sanksi pidana atas perusakan sumber daya ikan dan lingkungan perairan.
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perikanan termasuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung perikanan. Pasal 7 ayat (2): Pemerintah wajib menyediakan prasarana dan sarana untuk mendukung usaha perikanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk di bidang kelautan dan perikanan. - Penegasan tanggung jawab daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan tingkat kewenangannya (provinsi dan kabupaten/kota). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 47/PERMEN-KP/2014 tentang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap - Mengatur standar dan jenis sarana-	Tujuan: - Menstandarkan penyediaan sarana-prasarana tangkap seperti kapal, alat tangkap, pelabuhan perikanan, cold storage, dll. - Meningkatkan produktivitas nelayan tangkap melalui dukungan infrastruktur yang sesuai kebutuhan. Permasalahan yang Diselesaikan: - Tidak meratanya distribusi fasilitas perikanan tangkap. - Kinerja perikanan tangkap rendah akibat fasilitas yang usang/tidak memadai.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	Tujuan/ Masalah Yang Di Selesaikan
		prasarana perikanan tangkap yang harus disediakan oleh pemerintah untuk mendukung nelayan. Permen KP Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan - Menegaskan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya, seperti kolam, benih, pakan, sistem irigasi, dll. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 - Tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan keuangan. Di dalamnya memuat kode kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.	
5	Peningkatan promosi dan kerja sama untuk meningkatkan Jaringan pemasaran di dalam maupun luar negeri	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009) Pasal 65 dan 66 mengatur tentang pembinaan usaha perikanan, termasuk: - Pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan - Promosi dan pengembangan jaringan usaha perikanan - Penguatan kerja sama antar pelaku usaha dalam dan luar negeri Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (turunan UU Cipta Kerja) - Mengatur mengenai peningkatan kemitraan usaha, promosi, dan ekspor hasil kelautan dan perikanan Pasal-pasal terkait mengatur fasilitasi pemasaran dan promosi produk perikanan oleh pemerintah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan - Mendorong fasilitasi pelaku usaha dalam promosi, pameran, misi dagang, dan pemasaran ekspor produk kelautan dan perikanan	Tujuan: - Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengakses pasar melalui promosi dan pameran. - Meningkatkan partisipasi usaha perikanan dalam misi dagang dan promosi ekspor. Permasalahan yang diselesaikan: - Minimnya dukungan promosi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. - Kurangnya partisipasi dalam event promosi nasional dan internasional. - Ketidaksiapan pelaku usaha dalam menghadapi pasar global.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	Tujuan/ Masalah Yang Di Selesaikan
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan • Menekankan pentingnya penguatan sistem perdagangan luar negeri termasuk ekspor hasil perikanan • Pasal 3 dan 4: Pemerintah wajib mendukung pemasaran produk nasional melalui promosi dan kerja sama dagang	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Kelautan dan Perikanan agar membuat suatu sistem sebagai sarana dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menaikkan PAD melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. - Upaya menaikkan PAD ini tercantum pada aturan tersebut di lampiran II tentang retribusi jasa usaha halaman 18. - Retribusi Jasa Usaha untuk menunjang PAD Sumatera selatan adalah: Sewa Cold Storage dan Sewa Fasilitas Pelabuhan (Tanah/Lahan/lapak, Kios/Gedung Penyimpanan Es dan Peralatan Pemasaran Ikan [gerobak, coolbox, keranjang ikan, tong, timbangan]) - Tarif yang tertera pada Lampiran Perda tersebut telah dinaikkan dan menyesuaikan dengan kondisi saat perda tersebut disusun.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah menjawab upaya menaikkan PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan, setidaknya sampai ada sub sektor lain yang bisa diusulkan kembali untuk mendapatkan pendapatan selain dari sub sektor yang sudah tercantum pada Perda tersebut.

BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

4.1 Urusan Pemerintahan yang di tugas-pembantuan

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)			
			No. Loan	PHLN	Rupiah	Total	S (%)	R (%)	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	No DIPA: 032.01.4.690935/2024	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan <i>032.01.WA Program Dukungan Manajemen</i> 032.01.WA.2325 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	-	-	195.106.000 195.106.000	195.106.000 195.106.000	100,00 100,00	99,60 99,60			100,00 100,00	100,00 100,00
					195.106.000 195.106.000	195.106.000 195.106.000	100,00 100,00	99,60 99,60	- Layanan Manajemen Kinerja Internal		100,00 100,00	100,00 100,00
2	No DIPA: 032.03.4.119114/2024	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan <i>032.03.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</i> 032.03.HB.2337 Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan 032.03.HB.2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 032.03.HB.2339 Pengelolaan Pertinisan dan Kenelayanan 032.03.HB.2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan <i>032.03.WA Program Dukungan Manajemen</i> 032.03.WA.2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	-	-	334.713.000 334.713.000	334.713.000 334.713.000	100,00 100,00	97,87 97,87			100,00 100,00	100,00 100,00
					130.089.000 27.503.000	130.089.000 27.503.000	100,00 100,00	95,91 98,39	- Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		100,00 100,00	100,00 100,00
					44.306.000	44.306.000	100,00	93,60	- Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		100,00	100,00
					47.611.000	47.611.000	100,00	95,73	- Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		100,00	100,00
					10.669.000	10.669.000	100,00	99,91	- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat		100,00	100,00
					204.624.000 204.624.000	204.624.000 204.624.000	100,00 100,00	99,11 99,11	- Pemantauan Produk - Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan Manajemen Kinerja Internal		100,00 100,00	100,00 100,00
3	No DIPA: 032.04.3.119142/2024	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan <i>032.04.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</i> 032.04.HB.2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan <i>032.04.WA Program Dukungan Manajemen</i> 032.04.WA.2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	-	-	603.202.000 603.202.000	603.202.000 603.202.000	100,00 100,00	87,32 87,32			100,00 100,00	100,00 100,00
					391.188.000 391.188.000	391.188.000 391.188.000	100,00 100,00	88,68 88,68	- Penyidikan dan Pengujian Penyakit		100,00 100,00	100,00 100,00
					212.014.000 212.014.000	212.014.000 212.014.000	100,00 100,00	84,81 84,81	- Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan Manajemen Kinerja Internal		100,00 100,00	100,00 100,00
4	No DIPA: 032.05.3.119038/2024	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan <i>032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</i> 032.05.HB.2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	-	-	106.000.000 106.000.000	106.000.000 106.000.000	100,00 100,00	99,90 99,90			100,00 100,00	100,00 100,00
					106.000.000	106.000.000	100,00	99,90	- Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		100,00	100,00
5	No DIPA: 032.05.4.690980/2024	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan <i>032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</i> 032.05.HB.2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan <i>032.05.WA Program Dukungan Manajemen</i> 032.05.WA.2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	171.052.000 171.052.000	171.052.000 171.052.000	100,00 100,00	99,75 99,75			100,00 100,00	100,00 100,00
					89.600.000 89.600.000	89.600.000 89.600.000	100,00 100,00	99,54 99,54	- Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		100,00 100,00	100,00 100,00
					81.452.000 81.452.000	81.452.000 81.452.000	100,00 100,00	99,99 99,99	- Layanan Manajemen Kinerja Internal		100,00 100,00	100,00 100,00
6	No DIPA: 032.06.4.691018/2024	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan <i>032.06.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</i> 032.06.EC.2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 032.06.EC.2358 Pengolahan dan Bina Mutu Produk	-	-	310.591.000 310.591.000	310.591.000 310.591.000	100,00 100,00	98,27 98,27			100,00 100,00	100,00 100,00
					84.463.000 48.800.000	84.463.000 48.800.000	100,00 100,00	99,15 99,99	- Promosi		100,00 100,00	100,00 100,00
					35.663.000	35.663.000	100,00	98,01	- Fasilitas dan Pembinaan Industri		100,00	100,00

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)			
			No. Loan	PHLN	Rupiah	Total	S (%)	R (%)	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		032.06.WA Program Dukungan Manajemen 032.06.WA.2361 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saling Produk Kelautan dan Perikanan			226.128.000 226.128.000	226.128.000 226.128.000	100,00 100,00	97,93 97,93	- Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan Manajemen Kinerja Internal		100,00 100,00	100,00 100,00
7	No DIPA: 032.07.4.691056/2024	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 05 Lingkungan Hidup 05.04 Konservasi Sumberdaya Alam 032.07.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 032.07.FD.2362 Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 032.07.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 032.07.HB.2366 Perencanaan Ruang Laut 032.07.WA Program Dukungan Manajemen 032.07.WA.2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	-	-	218.500.000 218.500.000 218.500.000 218.500.000 130.000.000 130.000.000 30.000.000 30.000.000 58.500.000 58.500.000	218.500.000 218.500.000 218.500.000 218.500.000 130.000.000 130.000.000 30.000.000 30.000.000 58.500.000 58.500.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	97,65 97,65 97,65 97,65 98,12 98,12 100,00 100,00 95,39 95,39			100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
JUMLAH					1.939.164.000	1.939.164.000	100,00	95,08			100,00	100,00

4.2 Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Hambatan didalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Perubahan Dana APBN yang semula Dekonsentrasi menjadi Tugas Pembantuan (TP)
2. Terlambat di keluarkannya SK Penunjukkan KPA oleh Menteri
3. Terlambatnya penutupan rekening Dekonsentrasi dan Pembukaan Rekening TP

BAB V. PENUTUP

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah tujuan dasar dilakukannya pembangunan pada sektor ini. Pemanfaatan secara optimal potensi yang dimiliki oleh Sumatera selatan, khususnya perairan umum daratan (PUD) adalah upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dengan tetap menjaga kelestariannya. Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus pada bidang pembangunan kelautan dan perikanan ini antara lain adalah : peningkatan produksi baik dibidang budidaya maupun tangkap, peningkatan pendapatan pelaku usaha (NTN dan NTPI), ekspor produk kelautan dan perikanan Sumatera Selatan serta Angka Konsumsi Ikan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan perhatian kepada pengendalian dan pengelolaan sumber daya perairan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pengawasan lingkungan. Pengelolaan lingkungan perairan juga mengikut sertakan peran aktif masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil yang lebih baik. Upaya ini dilakukan guna menjaga kelestarian sumberdaya di masa mendatang.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertaanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun, diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaiknya.